

Beda di Awal, Bersatu di Akhir: Membaca Ramadan dan Idulfitri dengan Dewasa

Oleh: Allan Setyoko

(Pranata Humas Ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Jambi)

Pendahuluan

Dalam khazanah fiqh klasik, perbedaan pendapat bukanlah kegagalan nalar keagamaan. Ia justru dipahami sebagai konsekuensi wajar dari usaha manusia membaca teks dan realitas. Para ulama sejak awal telah menyadari bahwa kebenaran ijthadi bersifat *zanni*, tidak absolut.

Imam al-Syafi'i, misalnya, secara terbuka mengakui kemungkinan kekeliruan dalam pendapatnya: *ra'yi ṣawāb yaḥtamil al-khaṭa', wa ra'yu ḡhayri khaṭa' yaḥtamil al-ṣawāb* pendapatku benar tetapi mungkin salah, pendapat orang lain salah tetapi mungkin benar. Pernyataan ini bukan sekadar etika ilmiah, melainkan fondasi kedewasaan beragama.

Dalam konteks penentuan awal Ramadan, perbedaan metode hisab dan rukyat telah dibahas sejak berabad-abad lalu. Perbedaan tersebut tidak pernah diposisikan sebagai ancaman terhadap ukhuwah, melainkan sebagai ruang ijthad yang sah. Bahkan, dalam literatur fiqh, dikenal kaidah *ikhtilāf al-ummah raḥmah* perbedaan umat adalah rahmat bukan karena perbedaan itu nyaman, tetapi karena ia mencegah absolutisme.

Masalah muncul ketika warisan fiqh ikhtilaf ini tercerabut dari kesadaran umat. Perbedaan yang dahulu dipahami sebagai keniscayaan ilmiah, kini dipersempit menjadi pertarungan identitas: siapa lebih benar, siapa lebih taat, siapa lebih “sesuai negara”.

Ikhtilaf dalam Bingkai Kebangsaan

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama sepenuhnya dari ruang publik. Posisi ini membuat negara sering berada di wilayah abu-abu: diharapkan menjadi

pemersatu, tetapi juga diminta tidak mematikan keragaman praktik keagamaan.

Dalam konteks awal Ramadan dan Idulfitri, negara melalui Kementerian Agama menjalankan fungsi *tanfīz al-aḥkām* mengambil keputusan administratif demi kepastian sosial. Namun, keputusan ini kerap disalahpahami sebagai penetapan kebenaran teologis tunggal.

Saat ini Indonesia telah menerapkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk menentukan penanggalan Hijriyah. Adapun kriteria baru tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (*elongasi*) minimal 6,4 derajat sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudkan unifikasi kalender hijriyah.

Di sinilah ketegangan muncul. Tradisi fiqh mengakui pluralitas ijtihad, sementara logika negara membutuhkan kepastian. Jika tidak dijelaskan secara jujur dan dewasa, publik akan terus terjebak pada dikotomi semu: taat negara versus taat agama.

Padahal, dalam konteks kebangsaan Indonesia, perbedaan awal Ramadan justru bisa dibaca sebagai latihan hidup bernegara dalam keberagaman. Negara tidak sedang memaksa keseragaman iman, melainkan mengelola keteraturan sosial. Sebaliknya, warga beriman tidak sedang melawan negara, melainkan menjalankan keyakinan ijtihadi yang sah.

Beda di Awal, Bersatu di Akhir sebagai Etika Publik

Masalah mendasarnya bukan pada perbedaan kalender, melainkan pada rendahnya literasi ikhtilaf, baik keagamaan maupun kebangsaan. Pendidikan agama kita sering berhenti pada hasil akhir (kapan puasa di mulai), bukan pada proses keilmuan yang melahirkannya.

Akibatnya, masyarakat terbiasa menuntut kepastian tunggal. Perbedaan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai ruang dialog. Dalam konteks kebangsaan, cara berpikir semacam ini berbahaya. Ia

melahirkan watak eksklusif, sulit berkompromi, dan rentan memecah solidaritas sosial.

Jika pendidikan Indonesia ingin melahirkan warga yang matang secara religius dan dewasa secara kebangsaan, maka fiqh ikhtilaf perlu diajarkan bukan sebagai daftar perbedaan, tetapi sebagai etika hidup bersama dalam ketidaksamaan.

Ungkapan “beda di awal, bersatu di akhir” sejatinya bukan sekadar realitas tahunan, melainkan etika publik yang relevan bagi Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kesatuan tidak harus lahir dari keseragaman, dan perbedaan tidak otomatis berujung perpecahan.

Idulfitri yang sering dirayakan bersama, meskipun awal Ramadan berbeda, menunjukkan satu hal penting: umat sebenarnya mampu hidup dalam perbedaan, selama tidak terus-menerus diprovokasi oleh narasi menang - kalah.

Dalam konteks kebangsaan, ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Negara plural seperti Indonesia tidak membutuhkan kesamaan mutlak, melainkan kedewasaan kolektif.

Penutup

Membaca Ramadan dan Idulfitri dengan dewasa berarti mengembalikan ikhtilaf ke tempatnya yang semula: sebagai warisan keilmuan dan sarana pendidikan sosial. Perbedaan awal Ramadan bukan cacat persatuan, melainkan ujian kedewasaan.

Jika Ramadan adalah madrasah spiritual, maka ikhtilaf adalah kurikulumnya yang paling sulit. Ia menuntut kerendahan hati, kesabaran, dan kepercayaan bahwa persatuan tidak harus dibangun dengan memaksakan kesamaan.

Dalam konteks Indonesia, kedewasaan beragama dan kebangsaan bertemu di titik yang sama, yaitu kemampuan hidup bersama dalam perbedaan. Dan mungkin, di situlah makna Idulfitri menemukan relevansinya yang paling dalam.

